

JURNAL

STRATEGI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENIPUAN YANG DILAKUKAN MELALUI *ONLINE SHOP*



Diajukan oleh :

Daniel Kurnia Athuhema

N P M : 08 05 09870

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

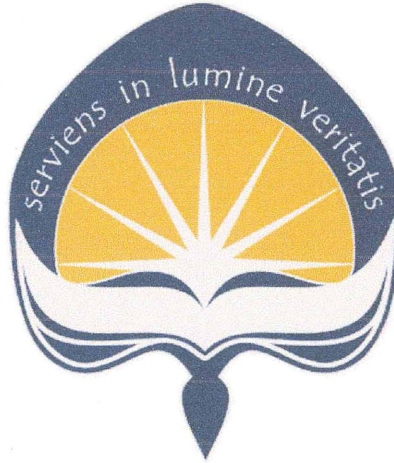
FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL

**STRATEGI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENIPUAN
YANG DILAKUKAN MELALUI *ONLINE SHOP***



Diajukan oleh :

Daniel Kurnia Athuhema

N P M : 08 05 09870

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Tanggal 21 Januari 2016

Dosen Pembimbing,

P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., MS.

STRATEGI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENIPUAN YANG DILAKUKAN MELALUI *ONLINE SHOP*

Daniel Kurnia Athuhema

Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta

Chipper_blue@yahoo.com

Technology development in indonesia today has put indonesia as part of the world information community. Development and progress of information technology which expand rapidly is dedicated to educate the people. On the other side of the progress of information technology also bore any new legal action, utilization of information technology should be done safely to prevent abuse which can harm the community. The development of information technology also play an important role in trade and the growth of the national economy, it is consummated with many popping up online shop website that offers various kinds of goods are needed by society. With the internet as a signs of technological progress that offers advantage economically, financial, power, and others which carrying a positive impact for the community, but communication via the internet also will produce a legal problems, like computer fraud and others problem.

Keyword: internet, computer fraud, legal problem, online shop

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di Indonesia sekarang ini telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat diperuntukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Di lain sisi kemajuan Teknologi Informasi juga melahirkan perbuatan hukum baru, pemanfaatan Teknologi Informasi harus

dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat. Perkembangan Teknologi Informasi juga turut berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional hal ini terwujud dengan banyak bermunculan *website online shop* yang menawarkan berbagai jenis barang yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Hampir semua pengamat kriminal sependapat bahwa kriminalitas berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Dengan demikian bahwa perkembangan penyalahgunaan komputer tidak dapat

dilepaskan dari perkembangan teknologi.¹ Perkembangan Teknologi Informasi juga turut berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional, hal ini terwujud dengan banyaknya bermunculan *website online shop* yang menawarkan berbagai jenis barang yang dibutuhkan masyarakat. *Website* dibuat untuk mengikuti perkembangan teknologi, informasi, dan telekomunikasi dalam hal memajukan pertumbuhan ekonomi dan informasi antar masyarakat.

Penyalahgunaan Teknologi Informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan membuat *website online shop* palsu menimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingga dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat, hal ini dikarenakan pertumbuhan pengguna *Internet* di Indonesia sendiri mencapai 82.000.000 (delapan puluh dua juta) pengguna *Internet*.²

Penyalahgunaan komputer yang mengarah kepada kejahatan komputer sudah berkembang sejak awal digunakannya peralatan canggih tersebut yang dilakukan dengan berbagai macam cara.³ Teknologi Informasi yang seharusnya digunakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa justru dijadikan sarana melakukan tindak pidana penipuan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi, kejahatan terhadap sistem dan jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer dikategorikan dalam *cyber crime* dalam arti luas.⁴ Secara terminologis, kejahatan yang berbasis pada teknologi informasi sebagaimana yang terjadi pada saat ini, dapat disebut dengan berbagai istilah yaitu *computer misuse*, *computer abuse*,

computer fraud, *computer-related crime*, *computer-assisted crime*, atau *computer crime*.⁵

Dalam dunia teknologi dan informasi dikenal ada istilah *cyber crime*, *cyber law*, *cyber space*, yang dikenal dalam dunia maya, istilah-istilah tersebut lahir dengan mengingat kegiatan *Internet* dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis *virtual*. Hal ini berdampak pada penegakan hukum dimana para penegak hukum akan menghadapi kesulitan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai “maya”, sesuatu yang tidak terlihat dan semu.⁶

Penegakkan Hukum di bidang Teknologi Informasi tidak terlepas dari peran Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan perkembangan teknologi sekarang ini Kepolisian RI dituntut untuk turut melakukan fungsinya dalam dunia teknologi yang telah menimbulkan banyak perbuatan hukum baru, dari hasil penelitian Aman Nursusila sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Prof. Dr. Widodo, S.H., M.H (Sistem Pemidanaan Dalam *Cyber Crime*) :

“Sampai dengan tanggal 31 Desember 2002, Sub-Direktorat Tindak Pidana Teknologi Informasi Markas Besar Polri mencatat ada 154 kasus *cyber crime*. Polri belum memiliki peralatan dan kemampuan yang memadai untuk melacak pelaku kejahatan sehingga dari 154 buah kasus hanya dapat disidik 12 kasus (7,79%). Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa Polri mengalami hambatan dalam menangani perkara *cyber crime*”.⁷

¹ Al. Wisnubroto, 1998, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Hlm. 40.

² www.kominfo.go.id, dipublikasi Kamis 8 Mei 2014, Pengguna *Internet* di Indonesia Capai 82 Juta, diakses Senin 29 September 2014.

³ Andi Hamzah, 1990, *Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

⁴ Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan Dalam Cybercrime*, Laksabang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 24.

⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

⁶ H. Ahmad M. Ramli, *Cyber Law & HAKI – Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

⁷ H. Ahmad M. Ramli, *Cyber Law & HAKI – Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 30.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kurangnya SDM dan peralatan yang memadai menjadi kendala kepolisian untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan *cyber crime* dan bagaimana strategi kepolisian untuk mengatasi kasus-kasus yang berkaitan dengan *cyber crime* dengan keterbatasan yang ada sehingga tidak terjadi keresahan dalam masyarakat. Peran kepolisian diharapkan dapat mengurangi tindak pidana penipuan yang memanfaatkan teknologi informasi sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran yang besar dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan dapat mengakibatkan permasalahan sendiri dalam masyarakat.

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas maka penelitian hukum ini menjadi relevan untuk ditinjau secara normatif untuk mengetahui pengaturan hukum tentang Strategi Kepolisian Dalam Menanggulangi Penipuan yang Dilakukan Melalui *Online Shop* sudah sesuai dengan norma, asas, dan prinsip peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Strategi Kepolisian Dalam Menanggulangi Penipuan yang Dilakukan Melalui *Online Shop* ?
2. Apa kendala yang dihadapi Kepolisian dalam mengatasi Penipuan yang dilakukan melalui *Online Shop* ?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian di atas, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau yang disebut dengan penelitian hukum normatif.

2. Sumber Data

Data skunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, meliputi: Norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang di peroleh melalui buku-buku, majalah, hasil penelitian, Internet, opini para sarjana hukum, praktisi hukum dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

c. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku atau tulisan dan hasil-hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap narasumber baik narasumber sebagai ahli di bidang hukum pidana khususnya ahli ITE maupun petinggi Kepolisian. Narasumber Kopol Asep Suherman, SE.,SH.,MH

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan dari hasil penelitian, maka peneliti akan melakukan analisis secara kualitatif, memahami atau mengkaji data secara sistematis yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dan hasil wawancara dengan narasumber. Data di analisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir secara deduktif, yaitu berpangkal dari mendeskripsikan teori-teori berupa peraturan perundang-undangan dan

peristiwa hukum yang relevan dengan penulis dan yang diperoleh secara umum, kemudian ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang ditarik adalah kesimpulan yang bersifat khusus.

Bab II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Strategi Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan

1. Pengertian Polisi

Polisi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksudkan dengan Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya); anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya). Polisi lebih dikenal dalam masyarakat sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polisi berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang dimaksud dengan keamanan dan ketertiban masyarakat diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggarakannya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan

nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.”

2. Tugas dan Wewenang Polisi

a. Tugas Polisi

Tugas Polisi terdapat dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Wewenang Polisi

Dalam menjalankan tugas sebagaimana di atur dalam Pasal 13 dan 14, Polisi diberi kewenangan yang di atur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. Memberikan izin operasional and melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Penipuan Melalui Internet**
- 1. Tentang Pengguna Internet**
- Pengertian *Internet* yang diungkapkan oleh Jannur Gilang Tamara adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer di seluruh

dunia melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi lain.⁸

2. Tentang Penipuan

Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum.⁹

Tindak pidana penipuan dalam KUHP diatur pada Buku Kedua, Bab XXV tentang perbuatan curang (*bedrog*) dari Pasal 378 s/d Pasal 395, namun tindak pidana pokoknya diatur dalam Pasal 378 :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu (*hoedanigheid*), dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

3. Kejahatan Internet

Kejahatan *Internet*/kejahatan dunia maya/*cybercrime* dapat di definisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan *Internet* yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi.

4. Penipuan Melalui Internet

Penipuan melalui *internet* berarti kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain dengan menggunakan sarana komputer yang terhubung ke jaringan *internet* atau *computer fraud*.

C. Strategi Kepolisian Dalam Menanggulangi Penipuan Yang Dilakukan Melalui Online Shop

1. Fasilitas Yang digunakan Pelaku Penipuan Online Shop

Dalam melakukan operasinya pelaku menggunakan *website* palsu sebagai fasilitas untuk menjerat korban yang masuk ke *website* yang telah dibuat oleh pelaku, dengan niat untuk membeli barang yang di tawarkan oleh pelaku.

Orang yang membuat *website* palsu disebut sebagai Pembuat Website palsu, sedangkan yang dimaksud dengan *website* dalam peraturan perundang-undangan belum terdapat suatu pengertian atau definisi mengenai *website*, kata *website* diartikan oleh Hendra W. Saputro dalam blognya :

“*Website* atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (*hyperlink*)”.¹⁰

2. Strategi Kepolisian

a. Strategi Kepolisian Dalam Mengatasi Kejahatan

Pada dasarnya, pencegahan kejahatan tidak memiliki definisi baku, namun inti dari pencegahan kejahatan adalah untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Untuk meningkatkan kinerja pencegahan kejahatan dalam rangka penyelenggaraan keamanan, arah

⁸ Jannur Gilang Tamara, *Definisi Internet*, <http://jannur-gilang.blogspot.com/2011/10/definisi-internet.html>, diakses tanggal 20 oktober 2014.

⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Penipuan>

¹⁰ Hendra W. Saputro, 1 Agustus 2007, *Pengertian Website dan Unsur-unsurnya*, <http://www.balebengong.net/teknologi/2007/08/01/pengertian-website-dan-unsur-unsurnya.html>, 20 oktober 2014.

kebijakan dan strategi yang dikembangkan Polri antara lain adalah :¹¹

- a. Pelaksanaan Polmas akan menjangkau semua titik sebaran pelayanan dengan kualitas pelayanan prima.
- b. Memperkuat Polsek sebagai unit pelayan terdepan.
- c. Melembagakan Polmas di seluruh desa dan komunitas dalam mendukung pencegahan kejahatan.
- d. Membangun citra Polisi pelayan masyarakat yang tegas dan humanis .
- e. Mendorong terbangunnya kemampuan keamanan swakarsa yang besar dalam komunitas;
- f. Membangun kemampuan manajemen Kepolisian dalam rangka meningkatkan yang efektif, efisien dan akuntabel;
- g. Membangun kemampuan Kepolisian di semua strata melalui berlandaskan paradigma pelayanan untuk mewujudkan dan dalam kinerja Kepolisian;
- h. Mewujudkan sistem penghargaan terhadap prestasi kinerja anggota Polisi dan komponen keamanan swakarsa;
- i. Membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang objektif dan edukatif dalam rangka mewujudkan manajemen Kepolisian sebagai sub sistem

b. Strategi Kepolisian Dalam Mengatasi Penipuan Online Shop

Dalam mengatasi kendala-kendala yang ditemukan pada kasus *cyber crime*, khususnya penipuan melalui *online shop*. Kepolisian menjalankan beberapa strategi, berikut tahapan yang dilaksanakan :

a. Pre-emptive

Memberikan pelatihan kepada anggota kepolisian khusus dan juga edukasi kepada masyarakat tentang *cyber crime*.

b. Pre-ventive

Tindakan pencegahan pihak kepolisian seperti patroli dan pemeriksaan terhadap dunia usaha.

c. Repressive

Memberikan efek jera kepada pelaku *cyber crime*

Selain itu saat ini pihak kepolisian telah dilengkapi dengan peralatan yang cukup memadai untuk mencari posisi pelaku penipuan *online shop*, seperti mencari posisi nomor yang digunakan pelaku untuk menjerat korban atau mencari posisi dimana pelaku menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam menjerat korban.

Pihak kepolisian juga tidak hanya mengandalkan perlengkapan yang ada untuk mencari posisi pelaku, tapi juga anggota kepolisian khusus diterjunkan ke lapangan, setelah posisi pelaku ditemukan melalui alat yang dimiliki kepolisian.

Menurut Kompol Asep Suherman, SE.,SH.,MH, seharusnya pembeli yang ingin membeli melalui *online shop*, harus membeli dari pihak ketiga dan tidak langsung membeli dari penjual. Contohnya seperti beberapa *online shop* yang telah ada, seperti Amazon, eBay, atau Google Store, Sehingga dapat mengurangi atau mencegah penipuan melalui *online shop*.

3. Kendala yang Masih dialami Kepolisian

Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dari hari ke hari, tingkat kejahatan di dunia maya pun semakin meningkat. Walaupun dengan peralatan yang cukup memadai yang dimiliki kepolisian dan juga penerapan strategi dalam mengatasi penipuan melalui *online*

¹¹

<https://polmas.wordpress.com/2014/10/17/strategi-pencegahan-kejahatan-dalam-rangka-harkamtibmas/>, di akses tanggal 7 Oktober 2015

shop, masih cukup banyak kendala yang dialami kepolisian, antara lain :

- a. Cek posisi
- b. Tidak ada kerjasama
- c. Penyebaran
- d. Alat bukti
- e. Peralatan
- f. Kekurangan tenaga

Saat ini sangat mudah dalam membuat akun atau membuat rekening di bank, cukup dengan memasukan data diri, di bank cukup dengan membawa KTP dan sudah dapat membuat akun dan rekening di bank. Pelaku dapat memasukan data palsu untuk membuat akun atau membuat KTP palsu untuk membuat rekening di bank dan saat dilacak alamat yang dituju tidak ada atau tidak tepat. Sehingga masih banyak kendala yang di alami kepolisian dalam menanggulangi penipuan melalui *online shop*.

Bab III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Strategi Kepolisian

Tidak ada strategi khusus yang di jalankan kepolisian selain pelatihan yang di berikan kepada anggota kepolisian khusus dan juga pengawasan terhadap dunia usaha *online shop*, dengan kata lain kejahatan dunia maya

di tangani seperti kejahatan biasa dimana strateginya antara lain adalah memperkuat polsek, membangun citra polisi, melembagakan polmas, membangun manajemen kepolisian, membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang objektif dan edukatif dalam rangka mewujudkan manajemen Kepolisian sebagai sub sistem, dll. Selain itu, dalam penanganan kasus *cyber crime*, Kepolisian tidak hanya mengandalkan alat pencari yang dimiliki Kepolisian, tetapi juga dilakukan secara manual, dengan cara turun langsung ke lokasi dimana pelaku di temukan oleh alat pencari dan tidak terpaku di tempat yang di tunjukan oleh alat pencari tersebut.

2. Kendala yang masih dialami

Walaupun dengan strategi yang di jalankan dan juga peralatan yang sudah cukup memadai, kepolisian masih mengalami kendala yang masih cukup banyak, misalnya pelaku yang berpindah-pindah tempat, barang bukti yang mudah di hapus atau dihilangkan, identitas palsu, kurangnya tenaga spesialis dalam bidang komputer, dll. Banyak kasus yang masuk dan masih banyak pula kasus yang belum bisa dipecahkan oleh kepolisian. Korban biasanya memilih untuk tidak memberitahu kepada polisi kecuali jika kerugiannya sendiri telah mencapai jutaan rupiah.

REFERENSI

BUKU

Ahmad M. Ramli, H., 2006, *Cyber dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lexi J. Moelong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung.

Ninie Supriani, 2009, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

Wisnubroto, Al., 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

-----, 2010, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Internet

www.kominfo.go.id, dipublikasi Kamis 8 Mei 2014, Pengguna Internet di Indonesia Capai 82 Juta, diakses Senin 29 September 2014.

Hendra W. Saputro, 1 Agustus 2007, *Pengertian Website dan Unsur-unsurnya*, <http://www.balebengong.net/teknologi/2007/08/01/pengertian-website-dan-unsur-unsurnya.html>, diakses 20 Oktober 2014.

Jannur Gilang Tamara, *Definisi Internet*, <http://jannur-gilang.blogspot.com/2011/10/definisi-internet.html>, diakses 20 Oktober 2014

Prasetya, Tugas Pengenalan Teknik Internet dan New Media, <http://prasepyaha.blogspot.com/2012/09/>, diakses 27 Oktober 2014

<http://raja-daddu.blogspot.com>, Rizki Cahyono dkk., 2013, *Contoh Kasus-kasus Penipuan Online Shop*, diakses 27 Oktober 2014

<http://id.wikipedia.org>

Kamus

www.kbbi.web.id